

**JOINT POLICE COOPERATION COMMITTEE POLRI-PDRM SEBAGAI UPAYA  
INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM MENJAGA  
KEAMANAN PERBATASAN PERIODE 2015-2017**

**Oleh: Adrian Pramana Putra**

*(adrian.pramana2614@student.unri.ac.id)*

**Supervisor : Dr. Tri Joko Waluyo, M.Si**

***Bibliography : 11 Journals, 15 Books, 17 Website, 5 Research Assistance***

Department of International Relations – Concentration at Diplomacy and Security  
Faculty of Social and Political Sciences Riau University  
KampusBinaWidya Km. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau 28293  
Telp: 0761-63272/ Fax: 0761-566821

*This research study of diplomacy and strategy analyses about the Indonesian and Malaysian efforts to protect border between two countries. The Purpose of this research explain about Indonesia-Malaysia defence and security cooperation general condition, especially in border region against transnational organized crime. As the strategy of the two countries to cooperate throug Joint Police Cooperation Committee between Polri and PDRM. This research focused on the effort of the cooperation to fight transnational crime in border region.*

*Indonesia-Malaysia border lies within seas and land. Start with in Malacca Strait, South China Sea, and in Borneo Island. Occurance of globalization made it people easier to cross between border legally nor illegally. This event used by crime actor to widen their crime such as drug smuggling, human trafficking, piracy and illegal fishing. To overcome this problem Indonesia and Malaysia had to commit a strategy and it is through burden sharing cooperation to put aside their political conflict and focus on bigger threat to their people and sovereignty.*

*This research used qualitative methods which is done by explaining the case based on facts. The collecting data techniques used in this research in studying the case is library research in the form of journals, books, official documents report, and website. Writer also used observation by attending one of the cooperation meeting as observer. The theory that appllied in this research is strategy theory under the realism perspective in nation-state analysis. Within the human security concept which is saw threat of a country is not from another country anymore.*

***Key Words: Effort, Border security, Joint Police Cooperation Committee Polri-PDRM, Transnational organized crime***

## Pendahuluan

Dalam konsep negara yang lahir melalui perjanjian Westphalia tahun 1618, Perbatasan merupakan aspek penting karena perbatasan menentukan wilayah dimana suatu otoritas diimplementasikan sekaligus menjadi pembatas dimana otoritas negara tersebut berakhir. Selain itu perbatasan juga merupakan aspek penting dimana kedaulatan negara bersinggungan dengan kedaulatan negara lain.

Perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan (*sovereignty*), pemanfaatan sumber kekayaan alam, menjaga menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. wilayah perbatasan suatu Negara merupakan warisan yang tak ternilai harganya, yang mana apabila dikelola dengan baik dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional. Di lain sisi kondisi ini adalah sebagai pintu gerbang masuknya ancaman atau gangguan. Jadi keamanan perbatasan dapat didefinisikan sebagai keadaan wilayah terluar dari suatu negara terbebas dari bahaya yang datang dari luar wilayah suatu negara tersebut.

Upaya dan pengamanan wilayah perbatasan terutama di Indonesia, baik laut maupun darat, masih menjadi permasalahan yang belum dapat terselesaikan secara tuntas dimana berbagai kejahatan lintas batas negara tetap terjadi. Walaupun Indonesia memiliki Instansi yang berperan dalam upaya pengamanan ini seperti TNI, Polri, BNN, Bea Cukai dan lainnya, kompleksitas permasalahan yang ada memosisikan pemerintah Indonesia harus secara lebih tanggap dan eksplisit dalam pengamanan wilayahnya.

Mengenai hal kedaulatan, ini terjadi merupakan dampak globalisasi dalam era kontemporer telah membuat kaburnya batas-batas antara negara yang satu dan

yang lain dengan terbukanya perdagangan bebas. Batas-batas antar negara yang semakin kabur telah menyebabkan jalur lalu lintas batas negara semakin mudah untuk diakses. Dalam era ini negara tetap harus menjaga kedaulatannya agar tidak hilang. Akses yang mudah dan bantuan teknologi yang semakin berkembang telah membuka jalur bagi mobilitas barang dan manusia antar negara. Perkembangan teknologi yang ada dan keadaan perekonomian yang ada di masyarakat inilah yang telah menyebabkan munculnya aktor-aktor yang berusaha untuk memanfaatkan situasi yang ada.

Aktor-aktor tersebut terus berkembang sehingga menjadi terorganisir dan diatur atau disebut *Transnational Organized Crime* yang disingkat TOC. Indonesia sangat rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan transnasional tersebut karena letak geografisnya yang strategis. Untuk itu, Indonesia mengintensifkan kerja sama internasional dalam mengatasi kejahatan-kejahatan transnasional guna melindungi kepentingan dan kedaulatan nasional Indonesia. Menurut perkiraan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), kegiatan kejahatan terorganisir di Indonesia dapat menghasilkan hingga \$1 Miliar per tahun.<sup>1</sup>

Lebih lanjut, Indonesia menaruh perhatian khusus terhadap kejahatan transnasional yang semakin berkembang. Dalam konteks tersebut, terdapat beberapa isu kejahatan transnasional di mana Indonesia berperan aktif, antara lain:

- a. *Human Trafficking*
- b. Perompakan
- c. Penyelundupan narkotika
- d. Penyelundupan barang ilegal

Sebagai negara berkembang dan memiliki populasi yang banyak, Indonesia

<sup>1</sup> *Organized Crime Racketeering Profits in Indonesia* diakses dari <https://www.havocscope.com/organized-crime->

[racketeering-profits-in-indonesia/](https://www.havocscope.com/organized-crime-) pada 10 Maret 2018

menjadi salah satu negara tujuan jalur perdagangan narkoba internasional. Luas dan letak wilayah yang strategis membuat Indonesia dijadikan tempat singgah dan beredarnya narkoba dengan berbagai cara bahkan juga Indonesia menjadi produsen. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya terungkap dan tertangkapnya para pengedar jaringan narkoba skala internasional.

Sama halnya dengan Indonesia, Malaysia juga dijadikan tempat tujuan dan transit jalur peredaran narkoba internasional. penyelundupan narkoba masuk ke Malaysia banyak berasal dari negara *golden triangle* yakni Thailand, Laos dan Myanmar serta negara-negara lain seperti Nigeria dan China. Dilihat dari sisi geografis Malaysia mencerminkan negara yang memiliki arti penting bagi peredaran narkoba di Indonesia. Upaya penyelundupan narkoba banyak dilakukan dari negara tetangga seperti Malaysia. Antara Indonesia dengan Malaysia memiliki letak geografis yang sangat dekat menjadi salah satu alasan mudah masuknya berbagai jenis narkoba.

Gambar 1.1 Jalur Masuknya Narkoba ke Indonesia



Sumber: Badan Narkotika Nasional, "Jalur Tikus Penyelundupan Narkoba", diakses melalui

<http://news.liputan6.com/read/2389854/jalur-tikus-penyelundupan-narkoba>,

Demi memfasilitasi komitmen menangani *transorganized crime*, Indonesia

<sup>2</sup> Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, 2010, "RPJNM 2010-2014", Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Jakarta, hlm. 63

melakukan kerjasama dengan negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia dimana salah satunya adalah Malaysia sebagai negara yang berbatasan langsung dan mempunyai perbatasan yang paling luas dengan Indonesia dengan garis batas negara di Pulau Kalimantan yang terbentang sepanjang 2004 km.<sup>2</sup> serta perbatasan maritim antara Indonesia dan Malaysia terletak di empat wilayah perairan, yakni Selat Malaka, Selat Singapura, Laut Cina Selatan, dan Laut Sulawesi dimana kedua negara sama-sama mengklaim *12-nautical-mile* (22 km). Sehingga diperlukan kerja sama dalam menjaga keamanan perbatasan antara kedua negara.

Namun, di beberapa kawasan kerjasama kedua negara dihadapkan pada berbagai permasalahan yang kompleks sebelum kejahatan transnasional, karena kedua negara juga mempunyai sejarah yang tidak akur mulai dari penegasan beberapa garis batas yang belum tuntas, masalah ketimpangan kesejahteraan, dan lain sebagainya.<sup>3</sup> Isu mengenai perbatasan Indonesia-Malaysia adalah fenomena bahwa isu ini menjadi topik yang sangat sensitif baik bagi masyarakat umum maupun elit politik. Rasa nasionalisme masyarakat Indonesia seakan sangat mudah terusik ketika isu-isu mengenai tindakan Malaysia yang sering dikaitkan dengan pelanggaran batas wilayah negara. Dimana sejarah kedua negara tidak terlepas dari berbagai kontroversi.

Hubungan bilateral bidang Militer-Pertahanan antara Indonesia dan Malaysia telah dimulai sejak ditandatanganinya perjanjian damai pasca konfrontasi pada tanggal 11 Agustus 1966. Sejak saat itu hubungan tersebut berlanjut dan diwadahi dalam forum *General Border Committee* (GBC) Malindo yang diresmikan pada

<sup>3</sup> Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2008, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, Kemhan RI: Jakarta, hlm. 13-14

tahun 1971.<sup>4</sup> GBC Malindo merupakan forum koordinasi dan kebijakan lintas sektoral tertinggi yang melaksanakan fungsi teknis yang dengan melibatkan berbagai unsur antara lain angkatan bersenjata, kepolisian, Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan instansi lain dari kedua negara.<sup>5</sup>

Pada tahun 2006 Menteri Pertahanan Juwono Sudharsono Indonesia Dalam sidang ke-35 *General Border Commitee* di Jakarta pada 15 Desember 2006 menjelaskan sepanjang tahun 2006 terjadi sekitar 70 kasus di perbatasan darat dan laut kedua negara, karenanya diperlukan tambahan kekuatan dan peralatan.<sup>6</sup> Oleh karena itu, Indonesia dan Malaysia sepakat membentuk *Joint Police Cooperation Commitee* untuk menanggulangi berbagai kejahatan kriminal dan kegiatan terorisme yang terjadi diperbatasan kedua negara. JPCC merupakan kerja sama kepolisian Indonesia dan Malaysia yang bersifat bilateral diantara Polri dan PDRM. Kesepakatan ini disahkan oleh ketua GBC Malindo yakni Menteri Pertahanan kedua negara pada saat itu, Prof. Dr. Juwono Sudharsono dan Dato' Sri Mohd Najib Abdul Razak.

Kewenangan penuh diberikan kepada Kepolisian dalam menangani kasus TOC. Kedua negara sepakat mengedepankan peran kepolisian dalam menangani pelanggaran hukum di lintas batas kedua negara karena merupakan kasus kejahatan kriminal, seperti *human trafficking*, perompakan, penyelundupan barang serta narkoba. Sebagaimana tugas

Polri dirumuskan dalam pasal 30 (4) UUD 1945. "Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.". Pada implementasi di lapangan Polri dapat meminta perbantuan kepada TNI, hal ini dijelaskan dalam UU No. 2/2002, Bab VIII, Bantuan, Hubungan dan Kerja Sama.

Joint Police Cooperation Committee (JPCC) Polri PDRM melaporkan perkembangannya kepada HLC yang dipimpin oleh Panglima TNI seperti halnya badan-badan lain di bawahnya, seperti Coordinated Operations Control Commitee (COCC), Jawatan Kuasa Latihan Bersama (JKLB), Kelompok Kerja Sosial Ekonomi (KK Sosek). Badan-badan dari kedua negara tersebut secara aktif setiap periode yang ditentukan melakukan aktivitasnya sesuai dengan fungsinya.

Kerjasama Indonesia-Malaysia terkait pengawasan perbatasan ini dikukuhkan melalui penandatanganan MoU GBC Malindo (General Border Commitee Malaysia-Indonesia) Protap No. 15 oleh Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo dengan Ketua Polis Negara Tan Sri Ismail Omar pada bulan Desember tahun 2010 di Kuala Lumpur, Malaysia.<sup>7</sup> Protap Malindo No. 15 ditetapkan sebagai panduan kerjasama kedua kepolisian yaitu:

1. Kerjasama pengawasan di perairan perbatasan antara Pasukan Gerakan Marin (PGM) PDRM dan Polisi Air POLRI.

<sup>4</sup> Subdit Bilateral Kementerian Pertahanan Indonesia, 2017, *Pointers Kerjasama Pertahanan Indonesia-Malaysia*. Jakarta: Kemhan RI

<sup>5</sup> Fuat Albayumi, 2012, *Soft Law Sebagai Sebuah Strategi: Studi Kasus Piagam Asean (ASEAN Charter)*, Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional Vol. 12, No. 2. Hal 1

<sup>6</sup> Antara News, 2006, *RI-Malaysia Bentuk Komite Kerjasama Kepolisian*, diakses melalui [https://www.antaraneews.com/berita/48827/ri-](https://www.antaraneews.com/berita/48827/ri-malaysia-bentuk-komite-kerjasama-kepolisian)

[malaysia-bentuk-komite-kerjasama-kepolisian](https://www.antaraneews.com/berita/236218/polri-pdrm-kerja-sama-menindak-kejahatantransnasional) pada 12 Februari 2018

<sup>7</sup> "Polri-PDRM Kerja Sama Menindak Kejahatan Transnasional", <http://www.antaraneews.com/berita/236218/polri-pdrm-kerja-sama-menindak-kejahatantransnasional>, diakses tanggal 14 Maret 2018

2. Kerjasama bidang komunikasi antara PDRM dan POLRI.
3. Kerjasama pengawasan terkoordinasi daratan antara Kontinjen Sabah dengan POLDA Kalimantan Timur.
4. Kerjasama pengawasan terkoordinasi daratan antara Kontinjen Sarawak dengan POLDA Kalimantan Barat.
5. Kerjasama menangani tindak kriminal antara PDRM dan POLRI.

Berdasarkan panduan kerja sama Protap No. 15. JPCC dibagi menjadi dua tim berdasarkan fungsi dan kegiatan yang dilakukan yakni Tim Perancang Operasi Kepolisian (TPOK) dan Tim Perancang Latihan Kepolisian (TPLK).

Sejak diresmikan tahun 2006, *Joint Police Cooperation Committee* (JPCC) Malindo melakukan berbagai kegiatan kepolisian dalam menjaga keamanan perbatasan Indonesia-Malaysia. Namun disamping itu juga banyak instansi lain di Indonesia yang juga menangani transnasional di perbatasan seperti BNN, Bea Cukai, dan TNI. Berkembangnya globalisasi sehingga membuat TOC juga semakin modern.

Berdasarkan fenomena yang ada, penulis ingin meneliti dan membahas lebih lanjut permasalahan **“Bagaimana upaya Indonesia dan Malaysia menjaga keamanan perbatasan melalui kerja sama *Joint Police Cooperation Committee* Polri-PDRM periode 2015-2017?”**. Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Memberikan penjelasan mengenai upaya Indonesia dan Malaysia melalui *Joint Police Cooperation Committee* (JPCC) Polri-PDRM.
2. Menjelaskan gambaran mengenai keamanan perbatasan Indonesia dengan Malaysia.

3. Menjelaskan gambaran kegiatan yang dilakukan dalam kerja sama JPCC Polri-PDRM dalam menjaga keamanan perbatasan Indonesia-Malaysia.

### Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif eksplanatif. Penulis akan menjelaskan mengapa Indonesia mempertahankan kerja sama *Joint Police Cooperation Committee* (JPCC) Malindo Polri-PDRM. Dimana dalam penelitian deskriptif eksplanatif mempunyai konsep dasar penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui teknik *library research*, Serta menggunakan fasilitas internet dalam memperoleh data tambahan untuk penelitian ini. Selain itu, penulis juga melakukan *observation* dengan mengikuti pertemuan dari lembaga terkait sebagai *observer*.

### Perbatasan Indonesia dengan Malaysia

Perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Asia Tenggara mencakup perbatasan darat yang terbentang sepanjang 2.019 km di Pulau Kalimantan dan perbatasan maritim di sepanjang Selat Malaka, Selat Singapura, Laut Cina Selatan, dan Laut Sulawesi. Wilayah perbatasan laut Indonesia dan Malaysia bertemu hanya di Selat Malaka dan Laut Singapura. Oleh karena itu daerah Indonesia terluar Indonesia yang berbatasan dengan Malaysia adalah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Utara dan Aceh.

Republik Indonesia (RI) adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa. Dengan populasi yang diperkirakan mencapai 261,9 juta jiwa<sup>8</sup>

<sup>8</sup> “Jumlah Penduduk Indonesia”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01>

/12/berapa-jumlah-penduduk-indonesia diakses pada 13 Juli 2018

pada tahun 2017 ini adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan terbesar di Asia Tenggara. Indonesia memiliki wilayah yang sangat strategis berada di antara Samudera Pasifik dan Hindia serta berada di antara Benua Asia dan Australia. Sehingga Indonesia yang merupakan negara kepulauan ini menjadi wilayah perdagangan penting dunia setidaknya sejak abad ke-7. Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki perbatasan darat dengan tiga negara yakni antara lain: Malaysia, PNG dan Timor Leste. Sedangkan untuk wilayah Laut Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Australia, India, Thailand, Filipina, Vietnam, PNG, Palau dan Timor Leste.

Perbatasan Malaysia terdiri atas perbatasan darat dan maritim dengan Brunei, Indonesia dan Thailand dan batas maritim dengan Cina, Filipina, Singapura dan Vietnam. Malaysia memiliki batas laut umum dengan Brunei, Indonesia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Bagian dari perbatasan maritimnya telah dibatasi melalui perjanjian dengan negara-negara tetangga. Malaysia mempunyai luas negara 329.847 km<sup>2</sup> yang merupakan 5 kali lebih kecil dari luasnya Indonesia.

Sebagai negara yang berbatasan dengan erat dan serumpun, tidak dapat dipungkiri bahwa penduduk khususnya penduduk wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan yang erat. Penduduk yang tinggal di wilayah perbatasan memiliki mobilitas yang tinggi dalam kegiatan sosial maupun ekonomi diantara perbatasan, mobilitas yang tinggi ini terus terjadi baik secara legal maupun ilegal.

Ketertinggalan pembangunan di daerah perbatasan di Indonesia semakin mencolok jika dibandingkan dengan wilayah Malaysia yang dimana lebih maju dan lebih dahulu dalam pembangunan. Kondisi daerah perbatasan Malaysia yang lebih baik dan akses yang lebih mudah

membangun citra positif wilayah Malaysia bagi penduduk wilayah perbatasan Indonesia. Kemudian menjadi alasan untuk penduduk Indonesia mencari penghidupan baik bekerja, berdagang atau hanya berbelanja ke Malaysia baik secara legal maupun ilegal.

### **Ancaman *Transnational Organized Crime* di Perbatasan Indonesia dengan Malaysia Tahun 2015-2017**

Pada persoalan dalam wilayah perbatasan menjadi isu sensitif, terutama dapat secara langsung atau tidak dapat mempengaruhi interaksi antara kedua warga negara cukup aktif, terutama dalam hal perdagangan. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dibidang teknologi khususnya teknologi informasi menyebabkan sekat atau batas sebuah negara dengan negara lain seperti tidak jelas lagi. Konektivitas manusia dipermukaan bumi ini walaupun berada dalam negara berbeda tidak lagi menjadi hambatan untuk saling berintegrasi satu sama lain dan menyebabkan aktivitas lintas batas negara semakin aktif. Hal ini menyebabkan meningkatkan aktivitas perekonomiannya, terutama di kawasan perbatasan. Namun demikian dalam perkembangannya, globalisasi tidak selamanya membawa dampak positif tapi juga memiliki dampak negatif terhadap keamanan wilayah suatu negara dengan munculnya kejahatan Transnasional (*Transnational Organized Crime*) yang kemudian menjadi satu bentuk ancaman baru bagi keamanan manusia dan Negara

Indonesia dan Malaysia yang memang sudah bekerja sama dalam bidang pertahanan dan keamanan dengan walaupun dinamika yang diwarnai konflik, tetapi kali ini harus mengesampingkan konflik untuk menghadapi masalah yang lebih nyata dalam menangani kejahatan transnasional yang sedang mengalami perkembangan yang luar biasa, baik dalam modus maupun organisasi. Menurut

*Havocscope Global Black Market information*, Indonesia sendiri merupakan negara ke-13 paling beresiko terhadap TOC dan sementara Malaysia menempati posisi ke-40. Namun hal ini tetap menjadi perhatian kedua negara melihat berbagai kejahatan yang dihadapi di perbatasan kedua negara seperti perompakan, penyelundupan narkoba, penyelundupan barang dagang dan perdagangan manusia dari waktu ke waktu semakin canggih dan terorganisasi. Hal ini dapat menjadi ancaman serius bagi stabilitas bagi negara.

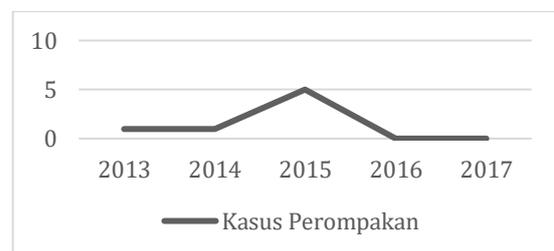
Terdapat 4 jenis kejahatan transnasional yang dapat diperhatikan di perbatasan Indonesia dengan Malaysia yakni

- a. Perompakan yang sering dilakukan di Selat Malaka yang merupakan jalur lintasan perairan internasional yang terletak di perbatasan kedua negara,
- b. Penyelundupan dan perdagangan manusia yang dimana kebanyakan adalah warga negara Indonesia yang dijadikan TKI.
- c. Penyelundupan narkoba dan barang ilegal yang dilakukan baik melalui jalur perairan maupun daratan. Hal tersebut berpengaruh terhadap keamanan masyarakat terutama masyarakat perbatasan.
- d. Penyelundupan barang secara ilegal yang dapat merugikan negara.

Negara melakukan upaya-upaya dengan mengantisipasi kejahatan yang melewati lintas batas negara ini. Upaya yang dilakukan negara dengan instansi-instansi yang mempunyai peran dalam menangani kejahatan seperti kepolisian, tentara, petugas bea dan cukai dan lainnya. Melalui kerja sama bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Upaya juga datang dari pihak internasional seperti dengan UNODC, ICC IMB maupun dalam ruang lingkup regional seperti melalui IMF, ASEANAPOL.

Di perbatasan Indonesia dengan Malaysia tingkat kejahatan transnasional mengalami perubahan.

Dalam kasus perompakan dimana tahun 2015 terdapat 5 kejadian perompakan namun pada tahun-tahun berikutnya menunjukkan tidak adanya kasus. Pada tahun 2015 tingkat perompakan mengalami penurunan ke tahun 2016 dimana tidak ada kasus yang terjadi. Hal tersebut merupakan dampak positif dari banyaknya pihak yang berperan dalam menjaga keamanan perairan Selat Malaka yang merupakan hal yang vital dalam perairan Internasional. Hal ini diapresiasi oleh ICC *International Maritime Bureau* melalui *Annual Report* yang diterbitkannya yang menyatakan pada tahun 2015 tingkat perompakan tahun ke tahun 2016 dan 2017 dimana tidak ada kasus yang terjadi. Hal-hal tersebut merupakan dampak positif dari pihak-pihak yang terlibat dalam menjaga kenyamanan Selat Malaka yang merupakan hal yang vital dalam nuansa Internasional.



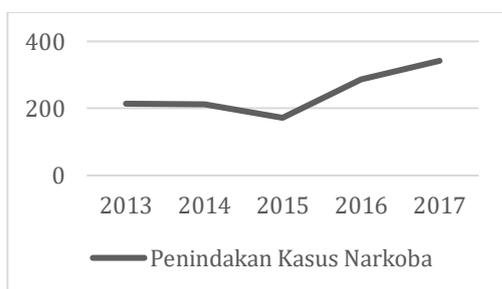
Grafik 1.1 Kasus Perompakan Tahun 2013-2017

Sumber: ICC IMB *Piracy and Armed Robbery Against Ships – 2007, 2014, 2017 Annual Report*.

Dalam Grafik 1.1 dijelaskan bahwa pada tahun 2015 terjadi 5 kali perompakan yang kemudian tidak terjadi kasus pada tahun berikutnya. Hal tersebut membuktikan keamanan pada Selat Malaka yang merupakan perbatasan Indonesia dengan Malaysia telah mencapai titik aman dimana banyaknya kegiatan-kegiatan oleh pihak yang terkait dalam menjaga keamanan perbatasan serta pembelajaran setelah 5 kali terjadi kasus pada tahun 2015 membuat pihak-pihak tersebut

mengintensifkan penjagaan keamanan kapal-kapal terhadap perompakan. Dengan intensitas penjagaan yang dilakukan menyulitkan pelaku perompakan untuk melakukan aksinya.

Sementara dalam penindakan narkoba menurut Catatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menunjukkan meningkatnya penindakan penyelundupan narkoba ke Indonesia setelah Indonesia ditetapkan sebagai negara darurat narkoba. Malaysia merupakan negara asal narkotika yang paling banyak ditangani Bea-Cukai diikuti dengan China, dan Hong Kong.



Grafik 1.2 Penindakan Penyelundupan Narkoba oleh Direktorat Bea-Cukai

Sumber: Badan Narkotika Nasional, diakses melalui: <https://x.detik.com/detail/investigasi/20180305/Indonesia-dan-Segitiga-Emas-Narkoba/index.php>

Berdasarkan grafik 1.2 sejak tahun 2015 Direktorat Bea Cukai mengalami peningkatan dalam kasus penyelundupan Narkoba. Adas dasar hal itu maka Narkoba yang berhasil disita akan semakin meningkat. Hal tersebut dapat menyebabkan efek jera kepada pelaku penyelundupan narkoba. Sementara itu meningkatnya jumlah narkoba yang berhasil disita pada saat penyelundupan juga akan mengurangi pemakaian Narkoba oleh warga negara.

Dalam *Human Trafficking*, Kalimantan Barat merupakan daerah yang memiliki jalur perbatasan darat dan langsung bersinggungan dengan Malaysia, hal ini sangat rawan terhadap berbagai *transnational crime*, termasuk perdagangan orang. Daerah perbatasan itu mencakup

lima kabupaten, masing-masing yaitu Aruk (Kabupaten Sambas), Jagoi Babang (Bengkayang), Entikong (Sanggau), Jasa (Sintang), dan Badau (Kapuas Hulu). Oleh karena intensitas kegiatan oleh pihak yang menjaga keamanan perbatasan akan ditingkatkan.

Data pasti jumlah korban human trafficking tidak dapat dikalkulasikan secara final. Meningkatnya aktivitas *trafficking* dalam proses migrasi internasional, sebagai akibat dari adanya nilai ekonomis tinggi dalam usaha ini. Disisi lain usaha ini dapat mempengaruhi *Human Security* dari suatu negara khususnya Indonesia sebagai salah satu *host human trafficking* yang terbesar. Dimana sebenarnya salah satu akar persoalan dari penyelundupan atau perdagangan manusia, adalah kemiskinan. Oleh karena itu upaya dalam mengurangi kasus penyelundupan manusia dapat berupa sosialisasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan agar tidak mudah jatuh kepada kejahatan Internasional. Namun di Indonesia sendiri *gap* kesejahteraan wilayah dengan Malaysia di Kalimantan masih terlihat jelas.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mencatat penindakan terhadap kasus peredaran rokok ilegal tahun 2016 merupakan yang paling tinggi jika dibandingkan tahun-tahun lainnya. Selaama 2016 dilakukan penindakan sebanyak 1.597 kasus. Dimana pada tahun-tahun sebelumnya penindakan rokok ilegal pada 2013 mencapai 635 kasus. Naik di 2014 menjadi 901 kasus, sementara pada 2015 sebanyak 1.232 kasus. Sama halnya seperti penyelundupan narkoba dengan jumlah kasus yang berhasil ditangani oleh pihak terkait semakin meningkat.

Berdasarkan penjelasan diatas tingkat keamanan di wilayah perbatasan Indonesia semakin meningkat dengan ditunjukkannya kasus yang ditangani. Hal

tersebut menjelaskan bahwa jika dengan kejahatan transnasional yang terus berkembang dan meningkat dapat diimbangi oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan tugasnya. Namun aktor yang bertanggung jawab menjaga keamanan perbatasan harus tetap konsisten dalam penjagaan keamanan perbatasan.

### **Sejarah Terbentuknya Kerja Sama JPCC Polri-PDRM**

Indonesia senantiasa menjalin hubungan baik secara bilateral dengan seluruh negara di dunia termasuk dengan Malaysia yang merupakan tetangga terdekat dari Indonesia. Kerjasama telah dibangun oleh kedua negara dalam rangka membangun kesepahaman dalam lingkup kesejahteraan bersama. Keterkaitan erat atas persamaan elemen-elemen seperti budaya, etnis, persepsi elit, identitas, kepemimpinan, nasionalisme, dan agama merupakan komponen dasar yang dianggap relevan untuk berkembangnya hubungan bilateral Malaysia dan Indonesia dan perumusan kebijakan negara.

Kerjasama perbatasan kedua negara yakni bidang keamanan diawali sejak tahun 1967. Kerjasama tersebut pertama kali dilakukan dalam melaksanakan operasi terkoordinasi mengatasi sejumlah PGRS/Paraku dan sisa-sisa G-30-S/PKI yang bergerak di sepanjang perbatasan kedua negara yakni Kalimantan Barat-Serawak yang tentunya mengganggu keamanan kedua negara. Persetujuan mengenai Pengaturan Dalam Bidang Keamanan Daerah-Daerah Perbatasan, ini direvisi untuk pertama kali pada 1972, dan revisi kedua 1984.<sup>9</sup>

Implementasi dari *Security Arrangement* 1972, dibentuklah Panitia Umum Perbatasan yang disebut General Border Committee Malaysia-Indonesia

(GBC Malindo) pada Juli 1972 di Perapat, Sumatra Utara. GBC Malindo ini merupakan badan kerjasama bilateral antara Malaysia dan Indonesia dalam bidang militer dan pertahanan. GBC Malindo merupakan forum koordinasi dan kebijakan lintas sektoral yang melaksanakan fungsi teknis dengan melibatkan berbagai unsur antara lain angkatan bersenjata, kepolisian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan instansi lain dari kedua negara.

Revisi Security Arrangement 1984 atau biasa disebut SA-84 diperluas lingkungannya yang kali ini bukan hanya menyangkut bidang pertahanan. Lingkup kerjasama perbatasan RI-Malaysia setelah mengalami revisi kedua ini diperluas hingga mencakup berbagai jenis bidang yaitu ideologi, politik, sosial, budaya dan ekonomi.<sup>10</sup> Dengan adanya revisi kedua ini maka Kegiatan GBC terfokus meliputi dua bidang yaitu bidang operasi dan bidang non operasi.

Seiring berkembangnya zaman melalui globalisasi, keamanan perbatasan mengalami pergeseran atas munculnya ancaman lain yang dapat mengganggu kedaulatan negara yakni *Transnasional Organized Crime* yang merupakan tindak kejahatan yang dilakukan melewati batas negara. Kejahatan tersebut terus berkembang dan meningkat secara intensitas. Pola keamanan telah berubah arah dari era kemunisme dan perang dingin kepada era kejahatan transnasional. Atas dasar tersebut Indonesia dan Malaysia sepakat membentuk *Joint Police Cooperation Committee* sebagai kerja sama untuk menanggulangi kejahatan lintas batas yang terjadi di perbatasan kedua negara. JPCC disepakati dalam sidang ke-35 *General Border Committee* di Jakarta pada 15 Desember 2006, Kesepakatan ini

<sup>9</sup> Fuad Asaddin. 2010. "Pemekaran Wilayah Di Indonesia" diakses melalui

<http://www.setdaprovkaltim.info>, pada 30 Agustus 2018

<sup>10</sup> Fuad Asaddin. Loc.cit

disahkan oleh ketua GBC Malindo yakni Menteri Pertahanan kedua negara pada saat itu, Prof. Dr. Juwono Sudharsono dan Dato' Sri Mohd Najib Abdul Razak.

### **Struktur JPCC Polri-PDRM**

JPCC Indonesia-Malaysia antara kedua pihak kepolisian ini diketuai oleh 2 orang yang terdiri kedua pihak kepolisian. Ketua JPCC pada tahun 2017 adalah Asisten Kapolri Bidang Operasi, Irjen Pol Drs. Mochamad Iriawan dari pihak Polri dan DCP Dato' Azizan Bin Abd Aziz selaku Tim Pengarah Gerakan, Jab. KDN/KA sebagai ketua JPCC dari pihak PDRM. Sebagaimana JPCC disepakati dalam sidang ke-35 *General Border Committee* JPCC melaporkan perkembangan kegiatan serta evaluasinya kepada GBC Malindo yang merupakan forum tertinggi. Namun sebelum mencapai kepada GBC Malindo.

JPCC melaporkan perkembangan kegiatan kerja samanya kepada HLC seperti halnya badan-badan lain di bawahnya, seperti *Coordinated Operations Control Committee* (COCC), Jawatan Kuasa Latihan Bersama (JKLB), dan Kelompok Kerja Sosial Ekonomi (KK Sosek). Badan-badan dari kedua negara tersebut secara aktif melakukan aktivitasnya sesuai dengan fungsinya. Oleh karena itu JPCC melakukan pertemuan tahunan yang diselenggarakan guna membahas evaluasi dan merancang kelanjutan kerja sama yang disebut *Joint Police Cooperation Committee Meeting*. Kegiatan ini dilakukan di Indonesia dan Malaysia secara berselang. Hasil dari pertemuan inilah yang kemudian akan dilaporkan dalam HLC Malindo.

Dalam melaksanakan tugasnya demi tercapainya poin-poin dalam Protap Malindo No. 15, serta dimana kerja sama Indonesia-Malaysia terfokus dalam bidang operasi serta non-operasi. JPCC melaksanakan kegiatan dalam bidang operasi serta pelatihan sebagai non-operasi. Berdasarkan tugasnya JPCC dibagi menjadi dua tim yakni Tim Perancang Operasi

Kepolisian (TPOK) dan Tim Perancang Latihan Kepolisian (TPLK) yang juga mempunyai ketua dari kedua negara. Kegiatan-kegiatan tersebut dijadwalkan dan diterbitkan dalam kalender agenda tahunan yang kemudian dilaksanakan oleh pihak kepolisian terkait, sesuai dengan wilayah serta cakupan bidang kepolisian tersebut.

Sebagai kerja sama yang dibentuk untuk menjaga keamanan perbatasan maka kegiatan operasi adalah merupakan kegiatan yang penting dan pokok bagi JPCC. Dalam mengatur kegiatan operasi yang dilakukan JPCC dibentuk TPOK. TPOK adalah tim yang bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional kerja sama kedua kepolisian ini. Diketuai oleh Brigjen Pol Drs. Herry Wibowo, M.H. dan SAC Dato' Abdul Rahim Bin Abdullah. Kerja sama tim TPOK dapat dikatakan sangat luas karena mencakup tingkat pusat antara Satuan Mabes Polri dengan Cawangan PDRM hingga ke tingkat kewilayahan antara Polda dan Kontinjen. Sementara Kegiatan pelatihan merupakan kegiatan non-operasi yang dilaksanakan oleh JPCC. Oleh karena itu dibentuk TPLK merupakan tim yang bertanggung jawab terhadap kegiatan Pelatihan Kepolisian dan kegiatan Pertukaran Personil Kepolisian. TPLK diketuai oleh Brigjen Pol Drs. Supriyanto dari Polri dan SAC Azmi Bin Adam dari PDRM

### **Upaya Kegiatan JPCC Polri-PDRM Periode 2015-2017**

#### **a. Rapat dan Kunjungan Timbal Balas**

Kegiatan rapat dan kunjungan timbal balas yang dilakukan oleh pihak kepolisian dapat dilakukan dalam berbagai tingkat yakni Kontinjen – Polda, Polres – IPD maupun rapat dalam tingkat Pusat. Rapat yang dilaksanakan juga dapat mempunyai tujuan yang berbeda-beda, mulai dari pembahasan strategi, membahas masalah kejahatan dan lainnya. Kegiatan rapat dan kunjungan timbal balas dapat dikategorikan dalam upaya operasi karena

berdasarkan definisinya, Operasi Kepolisian adalah serangkaian tindakan dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan penanganan bencana.

Kunjungan juga rutin dilakukan agar kedua negara dapat saling bertukar pikiran dan pengalaman sehingga akan mendapatkan wawasan baru berkaitan dengan penanganan berbagai permasalahan keamanan dan kejahatan transnasional. POLRI dalam menerima delegasi PDRM, melakukan kajian secara mendalam terhadap berbagai informasi yang didapatkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan masukan yang terbaik dalam mengambil langkah-langkah selanjutnya dalam menangani tindak kejahatan.

Melalui 25 Kegiatan rapat JPCC Polri-PDRM melakukan upaya dalam mengeratkan hubungan kerja sama kedua negara, membahas strategi dan hal lainnya yang dianggap perlu. Disamping rapat juga dilakukan kunjungan-kunjungan secara bergantian hal ini menunjukkan bahwa hubungan yang baik akan membantu dalam upaya menjaga keamanan perbatasan. Tuan rumah dalam kegiatan rapat dan kunjungan dibagi cukup adil dimana Indonesia menjadi tuan rumah 11 dari kegiatan rapat dan kunjungan sedangkan Malaysia menjadi tuan rumah dari 14 kegiatan. Menjadi tuan rumah secara bergilir juga sudah merupakan kebudayaan dari kerja sama bilateral Malaysia-Indonesia. Forum tertinggi yakni GBC Malindo yang dilakukan secara tahunan juga diadakan bergilir dalam menjadi tuan rumah. Hal ini dilakukan agar meningkatkan hubungan baik dan tidak adanya kecemburuan diantara kedua negara.

#### b. Patroli di Perairan

Untuk memberantas jalur peredaran narkoba, perompakan, penyelundupan serta kegiatan kriminal lainnya, Pemerintah Indonesia melalui Polri melakukan upaya

melalui patroli bersama dengan PDRM Malaysia. Patroli bersama ini dilakukan dengan terkoordinasi di wilayah perbatasan. Kegiatan Patroli merupakan implementasi sesuai dasar kerja sama yakni Protap Malindo No. 15. Berdasarkan hasil patroli perbatasan di wilayah perairan, kedua negara menemukan bahwa banyak ditemukan jalur-jalur ilegal atau jalur tikus yang menjadi pintu masuknya narkoba ke Indonesia. Hal ini dikarenakan ditutupnya jalur resmi laut antara kedua negara bagi kapal-kapal kecil maupun kapal nelayan.

Dalam Kerja sama JPCC Polri-PDRM telah berkoordinasi dalam 13 kali Patroli terpadu di wilayah perbatasan perairan Indonesia dengan Malaysia dengan durasi yang bervariasi. Di perbatasan perairan Selat Malaka, Polda Riau dan Kontinjen Melaka merupakan kepolisian daerah yang melakukan patroli dengan melakukan sekali setahun dengan durasi satu bulan. Kegiatan ini dilakukan menyusuri wilayah perbatasan serta pelabuhan-pelabuhan tikus yang dimanfaatkan oleh TOC dalam melaksanakan aksinya. Perbatasan perairan kedua negara di sekitar pulau Kalimantan juga dilakukan Patroli oleh Polda Kaltim yang rutin dilakukan setiap bulannya pada awal 2016.

#### c. Patroli di Daratan

Disamping jalur laut, POLRI dan PDRM juga melakukan pengawasan terkoordinasi di wilayah perbatasan darat. Perbatasan di daratan menjadi salah satu jalur yang digunakan oleh jaringan internasional dalam menyelundupkan narkoba ke Indonesia. Saat ini perbatasan Indonesia dan Malaysia di daratan terdapat tiga pintu perbatasan yang resmi. Disamping itu juga ada sekitar 82 titik jalur yang tidak resmi. Perbatasan darat sangat rawan adalah wilayah perbatasan darat yang menjadi pintu masuk utama narkoba dari Malaysia ke Indonesia adalah Entikong di provinsi Kalimantan Barat.

JPCC telah melakukan 26 kali patroli di wilayah perbatasan daratan. Karena perbatasan Indonesia dan Malaysia hanya terletak di Pulau Kalimantan. Maka pihak yang melakukan Patroli adalah Polda Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur dari pihak Polri serta PDRM Kontinjen Serawak. Karena wilayah Kalbar merupakan wilayah yang lebih rawan dari masuknya narkoba dari Malaysia ke Indonesia dan penyelundupan manusia dari Indonesia ke Malaysia, JPCC menitikberatkan patroli di wilayah Kalimantan Barat dengan 24 kali patroli selama 2015-2017 dan hanya 2 kali di wilayah Kalimantan Timur.

#### d. *Rendezvous*

*Rendezvous* atau dapat disingkat RV sendiri dapat diartikan pertemuan di laut di titik yang telah disepakati terlebih dahulu guna membahas sesuatu atau saling berkoordinasi dan berbagi informasi dalam memerangi kejahatan lintas negara. Lebih lanjut, isu kejahatan lintas negara kejahatan yang diperbincangkan berkaitan dengan penyelundupan manusia dan barang termasuk Narkoba oleh karena itu para penegak hukum di laut kedua negara menyepakati untuk secara bersama-sama, isu. Hasil utama dari *Rendezvous* tersebut biasanya adalah adanya komitmen bahwa kedua belah pihak akan senantiasa menjaga dan mempertahankan hubungan koordinasi, komunikasi dan kerja sama yang sudah terjalin dengan baik selama ini, terutama dalam menangani beberapa permasalahan utama terkait dengan isu keamanan.<sup>11</sup> RV dilakukan di wilayah perbatasan yang telah ditentukan titik koordinatnya. Serta sasaran dalam pelaksanaan RV dilakukan dapat dalam memantau pencurian ikan yang memanfaatkan moda transportasi laut.

<sup>11</sup> "Polisi dan Polair Indonesia Rendezvous dengan Polis Marin Sabah di Nunukan" diakses melalui <https://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/Rendezvous-LO-Polri-KRI-Tawau-dan-Polair-Polres-Nunukan-Indonesia-dengan-Polis-Marin-Wilayah-4-Sabah,-Malaysia->

Dalam pelaksanaan RV, pada umumnya diakhiri dengan pelaksanaan patroli bersama yang dilakukan lebih kurang selama 15 menit sebelum kedua kapal kembali ke pangkalan masing-masing.<sup>12</sup> Beberapa hal positif dari hasil patroli bersama tersebut bahwa meskipun isu perbatasan antara Indonesia dan Malaysia masih dalam proses perundingan secara politik, namun isu perbatasan untuk meminimalkan terjadinya kejahatan lintas negara telah diwujudkan oleh aparat penegak hukum kepolisian kedua negara dalam pelaksanaan RV. Dimana RV berhasil dilaksanakan sebanyak 11 kali dalam 2015-2017.

#### e. Uji Coba Komunikasi

Uji coba komunikasi dilakukan kedua negara sepanjang tahun. Hal ini juga dilakukan guna meningkatkan koordinasi kedua kepolisian di wilayah perbatasan. Komunikasi yang dilakukan mengikuti arus globalisasi dengan melalui komunikasi digital dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi kedua negara. Hal ini dilakukan secara rutin juga sebagai upaya penanganan cepat darurat bila adanya teror atau kejahatan lain. Oleh sebab itu komunikasi diawali dengan saling berbagi nomor *hotline*. Selain Itu, kepolisian juga harus menanggapi dengan adanya kasus kejahatan transnasional yang dapat mengganggu komunikasi kedua pihak yaitu *Cyber Crime*.

Komunikasi diantara kedua kepolisian dituntut untuk berjalan sebaik mungkin. Menimbang baik PDRM maupun Polri akan melakukan pertukaran informasi secara konstan baik dalam tingkat pusat maupun daerah. Inovasi-inovasi baru dalam komunikasi dengan mengikuti globalisasi juga dilakukan oleh Polri dan PDRM.

di-Walles-Bay,-Nunukan.aspx pada 10 September 2018

<sup>12</sup> Hadli, "Polri dan PDRM Gelar Patroli Bersama di Perairan Perbatasan" diakses melalui <http://m.batamtoday.com/detail2.php?id=49516-Polri-dan-PDRM-Gelar-Patroli-Bersama-di-Perairan-Perbatasa> pada 11 September 2018

Dengan komunikasi yang stabil diantara kedua kepolisian negara akan terus mengecilkan probabilitas konflik-konflik lain yang muncul.

#### f. Pertukaran Informasi

Dalam memberantas jaringan kriminal keluar masuk dari Malaysia dan Indonesia, kedua negara diharuskan transparan dalam informasi kasus ataupun tersangka yang menyangkut kedua negara. Pertukaran Informasi sebenarnya telah dimulai dilaksanakan sebelum JPCC dibentuk. Pertukaran Informasi dilakukan sejak penandatanganan Nota Kesepahaman POLRI-PDRM di Bali pada tanggal 19 Mei 2005.

Bentuk koordinasi POLRI dan PDRM yaitu *police to police*, dimana melakukan pertukaran informasi secara langsung tanpa pihak ketiga. Informasi yang didapatkan pihak POLRI saat melakukan penangkapan dan penyidikan, hasilnya kemudian akan diteruskan ke pihak PDRM dan begitu juga sebaliknya.

Pertukaran informasi tidak hanya dilakukan dengan jalur interpol maupun melalui sarana komunikasi. Pertukaran informasi juga dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan operasi lainnya seperti pada saat kunjungan, patroli maupun pada saat melakukan RV. Dimana para personil kepolisian kedua negara bertukar Informasi secara langsung. Pertukaran informasi mempunyai peran vital dalam pengamanan keamanan perbatasan Indonesia dan Malaysia. Kejahatan lintas batas yang terjadi dengan mayoritas terjadi diantara batas negara tersebut. Dengan adanya pertukaran informasi diharapkan akan mempermudah personil kepolisian untuk memecahkan kasus-kasus kejahatan

transnasional yang menyangkut Indonesia dan Malaysia.

#### g. Pengawasan Pemulangan WNI

Pemulangan WNI sendiri bukanlah merupakan kegiatan JPCC yang terjadwal dalam kalender kegiatan tahunan yang diterbitkan. Tetapi hal ini dilaksanakan oleh JPCC di wilayah Kalimantan Timur yaitu Polda Kaltim melakukan pengawasan dari Pusat Tahanan Sementara (PTS) Tawau Malaysia menuju Pelabuhan Tunon Taka Kabupaten Nunukan menggunakan KM. Purnama Express. Pemulangan WNI dari PTS ini merupakan pemulangan korban penyelundupan manusia, pelaku kejahatan/kriminal Indonesia yang ditangkap di Malaysia namun mayoritas yang dilakukan pemulangan adalah TKI, dengan rata-rata WNI yang di deportasi karena dipulangkan karena melanggar peraturan keimigrasian Malaysia seperti dokumen yang bermasalah, paspor mati, dan sejumlah pelanggaran lainnya.<sup>13</sup> Kegiatan ini telah dilakukan 22 kali dengan total hingga 2.295 WNI.

Setelah dilakukan pendataan, WNI yang dideportasi dapat memilih langkah selanjutnya seperti kembali ke Malaysia setelah melengkapi dokumen-dokumen, pulang ke kampung halaman, serta bertahan dan mencari pekerjaan di Nunukan. Setelah melakukan pendataan dari BP3TKI, selanjutnya TKI yang dideportasi yang memilih untuk tetap tinggal di Nunukan akan difasilitasi dengan dipindahkan ke Rusunawa Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kalimantan Utara.<sup>14</sup>

#### h. Pertukaran Personil

JPCC melakukan upaya dalam pelatihan yang dilakukan oleh Tim Perancang Latihan Kepolisian (TPOK)

<sup>13</sup> "Dokumen Bermasalah, Ratusan TKI Dideportasi Malaysia" diakses melalui <http://kaltim.tribunnews.com/2017/08/13/dokumen-bermasalah-ratusan-tki-dideportasi-malaysia> pada 5 Oktober 2018

<sup>14</sup> "119 TKI Dideportasi dari Tawau, Sabah Malaysia" diakses melalui <http://kalimantan.bisnis.com/read/20170418/409/646148/119-tki-dideportasi-dari-tawau-sabah-malaysia> 5 Oktober 2018

JPCC. Upaya yang telah dilakukan dalam periode 2015-2017 diantaranya adalah program pertukaran personel. Namun dalam kurun waktu 2015 s.d. 2017 hanya dilakukan sekali pada yaitu pada November 2015. Hal ini disebabkan oleh kedua pihak baik Polri maupun PDRM mendapatkan kesulitan dalam waktu yang tepat dan cukup. Persiapan pertukaran personel dapat memakan waktu minimal 1 bulan sementara kedua kepolisian disibukkan dengan pengamanan dalam negara masing-masing. Anggaran juga menjadi permasalahan Polri dan PDRM hanya dapat melaksanakan sekali pertukaran personil.

Pertukaran Personil hanya dapat dilaksanakan sekali dapat dimaklumi oleh kepolisian kedua negara mengingat salah satu arahan dari Ketua JPCC pada saat JPCC meeting ke-12 dimana latihan yang dilakukan agar tidak mengganggu agenda masing-masing kepolisian. Dan juga arahan lainnya menjelaskan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan agar disesuaikan dengan anggaran serta waktu.

#### i. Pelatihan Kepolisian di JCLEC

Upaya pelatihan dilakukan pihak TPOK menitik beratkan pelatihan kepolisian di Jakarta *Centre of Law Enforcement Cooperation* (JCLEC) dengan total telah diikuti oleh 81 orang PDRM selama 2015 s.d. 2017. JCLEC sendiri merupakan pusat pelatihan unggulan dalam penegakan hukum yang bertaraf internasional. JELEC sendiri didirikan sebagai perwujudan kemitraan bilateral Indonesia dengan Australia untuk meningkatkan kapasitas kemampuan operasional para penegak hukum dalam menangani segala kejahatan lintas negara. Fasilitas pelatihan JCLEC diresmikan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada Juli 2004 itu berada di Semarang walaupun menyandang nama Jakarta.<sup>15</sup>

Secara struktur organisasi, JCLEC berada di bawah Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian. Untuk urusan keseharian, tugas Direktur Eksekutif adalah untuk mengelola operasional dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan JCLEC. Pada tahap pembangunan awal 5 tahun Pemerintah Australia menggelontorkan 36 juta dollar Australia untuk mendesain dan membangun JCLEC. Sementara setiap tahunnya Australia mengeluarkan 7 juta dollar Australia.

dilaksanakan 31 kali kursus dengan 14 tema kursus yang berbeda. Tema yang paling sering dilakukan adalah mengenai *International Cyber Crime Investigations*. Hal ini menunjukkan bahwa adanya jenis kejahatan baru yang perlu dipahami oleh kepolisian khususnya JPCC. Selama periode 2015-2017 tercatat ada 6 kali kursus pelatihan mengenai *Cyber Crime* tersebut. Sesuai arahan pada JPCC Meeting dimana kepolisian agar mempelajari modus-modus kejahatan baru. Diikuti dengan 5 kali kursus mengenai terorisme yang juga menjadi tren ancaman terhadap Indonesia dan Malaysia. Namun disamping itu pelatihan mengenai keamanan perbatasan dan kejahatan-kejahatan lainnya tetap dilaksanakan.

### Kesimpulan

Keamanan perbatasan tidak jauh dari adanya kejahatan transnasional yang dilakukan oleh kelompok kejahatan yang telah semakin terorganisir. Masalah ini telah menjadi perhatian global karena berkaitan dengan keamanan nasional suatu negara baik langsung maupun tidak langsung. Kejahatan-kejahatan seperti Narkoba, Penyelundupan barang, penyelundupan manusia, terorisme, perompakan akan menimbulkan rasa yang tidak aman bagi masyarakat penduduk suatu negara. Masalah ini perlu mendapat perhatian lebih dari pihak yang

<sup>15</sup> "JCLEC, Pusat Pelatihan Investigasi Polri Bertaraf Internasional" diakses melalui <https://news.detik.com/berita/1498605/jclec-pusat->

pelatihan-investigasi-polri-bertaraf-internasional pada 11 September 2018

bertanggung jawab dalam hal keamanan dan pertahanan.

Indonesia dan Malaysia juga memiliki permasalahan yang sama. Kedua negara ini menjadi sasaran negara asal, tujuan dan transit dari berbagai kejahatan transnasional. Kejahatan yang terjadi dilakukan melewati batas kedua negara. Hal ini menyebabkan kedua negara mengambil langkah dalam memberantas kejahatan lintas batas dan menjaga keamanan negara. Salah satu langkah yang diambil Indonesia dan Malaysia adalah kerja sama.

Luasnya perbatasan kedua negara merupakan potensi besar yang dimanfaatkan oleh pelaku TOC diikuti maraknya kasus kejahatan lintas batas yang menyangkut kedua negara mendorong kedua negara untuk semakin fokus dalam memerangi TOC lintas batas kedua negara. Pada GBC ke-35 tahun 2006 kedua negara sepakat mengamankan pihak kepolisian kedua negara dalam menjaga keamanan perbatasan dalam memerangi TOC melalui kerja sama yang dinamai *Joint Police Cooperation Committee* yang dilakukan kedua kepolisian yakni Polri dan PDRM.

Koordinasi kegiatan yang dilakukan Indonesia dan Malaysia melalui JPCC Polri dan PDRM adalah Protap No. 15 yang disahkan pada 2010. Untuk memudahkan menjalankan tugasnya JPCC dibagi atas 2 tim yakni Tim Perencana Operasi Kepolisian dan Tim Perencana Latihan Kepolisian. Berdasarkan hal tersebut, secara khusus, upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dan Malaysia melalui JPCC Polri-PDRM dalam memberantas kejahatan lintas batas adalah dengan upaya operasi dan pelatihan.

Dalam periode 2015-2017 upaya operasi oleh TPOK dilaksanakan berbagai kegiatan diantaranya patroli baik di darat maupun di laut, RV, Uji coba komunikasi, Pengawasan pemulangan WNI, dan pertukaran Informasi. Upaya-upaya ini dilakukan guna meningkatkan koordinasi

serta memerangi indikasi adanya kejahatan lintas batas kedua negara. TPLK yang bertanggung jawab dalam upaya bidang pelatihan melaksanakan sekali pertukaran personil. Serta melakukan berbagai kursus kepolisian yang dilakukan di *Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC)*. Bidang pelatihan yang banyak dilakukan adalah mengenai *Human Trafficking, Counter Terrorism* dan kejahatan baru yang membutuhkan perhatian lebih yaitu mengenai *Cyber Crime*.

Terlihat upaya Pemerintah Indonesia dan Malaysia terfokus kepada peningkatan koordinasi. Polri dan PDRM menilai bahwa dalam penjagaan keamanan koordinasi yang baik sangat diperlukan dimana masalah yang terjadi di perbatasan bisa dipecahkan dan ditemukan solusinya secara bersama dengan cepat. Hal itu dilakukan dengan mengintensifkan kegiatan bidang operasi yang dilakukan oleh kepolisian tingkat daerah yaitu Polda-Kontinjen. Kedekatan kepolisian hingga ke daerah dengan saling melibatkan kedua pihak dalam kegiatan. Dengan koordinasi yang lancar melalui komunikasi yang konstan akan memudahkan dalam pertukaran informasi yang merupakan salah satu upaya yang vital dalam menjaga keamanan perbatasan.

Dalam bidang pelatihan dilakukan di JCLEC agar personil kepolisian memiliki kualitas dalam menangani kasus dimana seiring berkembangnya globalisasi, TOC juga akan semakin berkembang. Contohnya saja banyak dilakukan kursus mengenai antisipasi *Cyber Crime* yang dapat menjadi permasalahan baru akibat globalisasi. Serta yang menarik perhatian para kepolisian Polri dan PDRM adalah terorisme dimana konflik di Timur Tengah melahirkan simpatisan-simpatisan di Asia Tenggara. Meningkatkan tantangan bagi kepolisian dalam menjaga perbatasan.

## Daftar Pustaka

**Jurnal :**

- Albayumi, Fuat, 2012, Soft Law Sebagai Sebuah Strategi: Studi Kasus Piagam Asean (ASEAN Charter), *Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional Vol. 12, No. 2*.
- Chandrawati, Nuraini, 2001, Perkembangan Konsep Keamanan dan Relevansinya Terhadap Negara Berkembang, *Jurnal Politik Internasional dan Keamanan Internasional vol. 2 No. 8*, Jakarta: Yayasan Obor
- Dina Oktarina, Studi Tentang Trafficking In Persons Di Kalimantan Barat”, *Jurnal Kejahatan Lintas Batas Indonesia-Malaysia*, Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta
- Hidayat, Rizal, 2017, Keamanan Manusia Dalam Perspektif Studi Keamanan Kritis Terkait Perang Intra-Negara, *Intermestic: Journal of International Studies Vol. 1*
- M. Saeri, Teori Hubungan Internasional sebuah pendekatan paradigmatic. *Jurnal Transnasional Vol. 03 No.02*, Februari 2012. Pekanbaru
- \_\_\_\_\_, Karakteristik dan Permasalahan Selat Malaka, *Jurnal Transnasional, Vol. 4, No. 2, 2013*. Pekanbaru
- Maygy Dwi Puspitasari, “Alasan Indonesia, Malaysia & Singapura Menjalin Kerja Sama Trilateral Patroli Terkoordinasi Malsindo di Tahun 2004”, *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, Vol. 3, No. 1, 2013.
- Muradi, 2015, Pengelolaan Pengamanan Perbatasan Indonesia, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 1*, Bandung: Cosmogov
- Niko, Nikodemus, “Fenomena Trafficking In Person Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat”, *RAHEEMA: Jurnal Studi Gender dan Anak. Program Studi Sosiologi, Pascasarjana FISIP, Universitas Padjadjaran*. Bandung
- Tjarsono, Idjang, 2014, Strategi Keamanan dan Paradigma Realis, *Jurnal Hubungan Internasional FISIP UR*, Pekanbaru
- Tirtosudarmo, Riwanto. 2002. Tentang Perbatasan dan Studi Perbatasan: Sebuah Pengantar. *Jurnal Antropologi Indonesia 67*. Jakarta

**Buku :**

- Agarwal, Amita, 2004. *Hazards of Piracy, Tankers, Oil Spills and Marine Pollution in the Straits of Malacca*, ISEAS
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar Dasar ilmu Politik*. Jakarta; Gramedia Pustaka.
- Burchill, Scott and Andrew Linklater. 2008, *Teori Teori Hubungan Internasional*. Bandung: Nusa Media.
- Buzan, Barry. 1991. *People, State, and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*. Hempstead: Harvester Wheatsheaf.
- \_\_\_\_\_, and Lene Hansen, 2009, *The Evolution of International Security Studies*, United Kingdom: Cambridge University Press.
- \_\_\_\_\_, Ole Wæver, Jaap de Wilde, 1998, *Security: A New Framework for Analysis*, USA: Lynne Rienner Publishers.
- Callabero, Mely, Anthony-Ralf Emmers and Ralf Emmers, 2006, *Understanding the Dynamic of Securitizing NonTraditional Security dalam Non-Traditional Security in*

- Asia, Singapore: Nanyang Technological University, Ashgate
- Chalk, Peter. 1997. *Grey Area Phenomena In Southeast Asia: Piracy, Drug Trafficking and Political Terrorism*. Australia: Australian National University.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Non military security and global order*. Oxford: Oxford University Press.
- Mas'ood, Mochtar, 1990. *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan ilmu*. Jakarta: LP3ES
- \_\_\_\_\_. 1994. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES
- Moleong, Lexy J. 2004, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya
- Morgenthau, Hans 1973 *Politics Among Nation: The Struggle for Power and Peace*. New York: Knopf.
- Muhamad Yani, Yanyan, 2008, *Pengamanan Wilayah Perbatasan Darat Guna Mendukung Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta: LEMHANAS RI.
- Pusat Komunikasi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2008, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, Kemhan RI: Jakarta.
- Sasangka, Hari, 2003. *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju: Bandung
- Website**
- Antara News, 2006, *RI-Malaysia Bentuk Komite Kerjasama Kepolisian*, diakses melalui <https://www.antaranews.com/berita/48827/ri-malaysia-bentuk-komite-kerjasama-kepolisian> diakses pada 12 Februari 2018
- Antara News, 2010, “*Polri-PDRM Kerja Sama Menindak Kejahatan Transnasional*”, <http://www.antaranews.com/berita/236218/polri-pdrm-kerja-sama-menindak-kejahatantransnasional>, diakses tanggal 14 Maret 2018
- dengan PDRM”, diakses melalui <http://www.tigapilarnews.com/berita/2017/03/27/101584-Stop-Narkoba-Asal-Malaysia-Polri-Kerja-Sama-dengan-PDRM>., pada 3 September 2018
- Natakesuma, Aji, 2017, “*Dokumen Bermasalah, Ratusan TKI Dideportasi Malaysia*” diakses melalui <http://kaltim.tribunnews.com/2017/08/13/dokumen-bermasalah-ratusan-tki-dideportasi-malaysia> pada 5 Oktober 2018
- Noffellisa, 2006, “*Indonesia-Malaysia Bentuk Joint Police Cooperation Committe*”, diakses melalui <https://www.erasuslim.com/berita/nasional/indonesia-malaysia-bentuk-joint-police-cooperation-committe.htm#>. WpLCWoNuaM8 pada 4 Februari 2018
- Polis Diraja Malaysia, “*Tugas Polis Diraja Malaysia*”, diakses dari <https://www.rmp.gov.my/infor-korporate/polis-diraja-malaysia/tugas>, pada 3 September 2018
- Rostanti, Qommairra. *Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Rokok Ilegal dari Malaysia*”, diakses melalui <https://www.republika.co.id/berita/>